

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amtenbrink, F. (1999). *The Democratic Accountability of Central Banks: A Comparative Study of the European Central Bank*. Hart Publishing.
- Arikunto, S. (2002). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mitra Hukum.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Atmosudirjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara, Cet. Kesepuluh*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhary, T. (1992). *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bawengan, G. W. (1983). *Sebuah studi tentang filsafat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Bentham, J. (2006). *Teori Perundang-undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*. Bandung: Nusa Media dan Nuansa.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Friedman, W. (1994). *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Gunarsa, A., & Sidharta, B. A. (2013). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Hakim, A. A. (2011). *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- HR. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Keraf, A. S. (1998). *Etika Bisnis: Tuntunan dan Relevansinya*. Kanisius.
- Livermore, M., Midgley, J., & Tracy, M. (Eds.). (2000). *The handbook of social policy*. Sage Publications.
- Magnis-Suseno, F. (1997). *13 Tokoh Etika. Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mangesti, Y.A. & Tanya, B.L. (2014). *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Partamo, A.P. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: CV Arkola.
- Rachels, J. (2004). *Filsafat Moral*, terj. *Sudiarja*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salam, B. (2000). *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2005). *Buku Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. Baru, Cetakan 38. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sujamto. (1990). *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, B. L. dkk. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan IV. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tjandra, W.R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Tumanggor, M.S. (2021). *Sekilas Pengetahuan Pasar Uang, Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan dan Penanaman Modal di Indonesia*, Bekasi: Penerbit F.
- Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Hadjon, P. M. (1998). Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid). *Pro Justitia*, 16(1).
- Lindbeck, A. (2006). *The welfare state-Background, achievements, problems* (No. 662). Sweden IFN working paper.
- Maulida, R. (2015). Pengalihan Kewenangan Bapepam-LK Kepada Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Pengawasan Transaksi Efek (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Mochtar, Z. A., & Satriawan, I. (2009). Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 155.
- Muchda, M. W. (2014). Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 75-92.
- Nasution, A. H. (2017). Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 9(1), 1-19.
- Nurtjahjo, H. (2005). Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tin. Jauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 275-287.
- Quintyn, M., & Taylor, M. W. (2003). Regulatory and supervisory independence and financial stability. *CESifo Economic Studies*, 49(2), 259-294.
- Rahyani, W. S. (2012). Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(3).

Seelig, S. A., & Novoa, A. (2009). Governance Practices At Financial Regulatory and Supervisory Agencies. *IMF Working Papers*, 2009(135).

Sigalingging, B. (2013). Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. *USU Law Journal*, 1(1), 14185.

Sudarwati, Y. (2014). Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.

PENELITIAN

Fransisca, L. (2016). *Independensi dan efektivitas Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dalam bidang perbankan di Indonesia = Independence and effectiveness of t* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).

MD, M.M. (2009). Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “*Saatnya Hati Nurani Bicara*” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Sitompul, Z. (2004). Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Pilars*, 7(2), 4.

Suharto, E. (2006, July). Negara kesejahteraan dan reinventing depsos. In *Makalah disampaikan pada Seminar yang bertema “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”* dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta.

Suharto, E. (2006, July). Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia? Dalam makalah yang disampaikan pada *Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Edi Suharto/WelfareStateDepsos/2006* (Vol. 21).

Undang, T. P. A. D. R. (2010). Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Jakarta.

Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI. *Sekretariat Negara RI. Jakarta*.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengaturan*, diakses melalui <https://kbbi.web.id/atur> pada 11 Maret 2021.

WEBSITE

- Asshiddiqie, J. *Gagasan Negara Hukum*. Pengadilan Negeri Sitoli, diakses dari https://pn.gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 8 April 2021.
- AWS, *Regulatory Overview Financial Services — South Korea*, diakses melalui <https://d1.awsstatic.com/fs-compliance-center/pdf-summaries/south-korea.pdf> pada tanggal 24 Mei 2021.
- Bank Indonesia, *Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK*, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx> pada hari 12 Mei 2021.
- Bisnis.Tempo.co. (2021). *OJK Catat Kelebihan Pungutan Tahun 2020 Rp 11,6 Miliar*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1447588/ojk-catat-kelebihan-pungutan-tahun-2020-rp-116-miliar/full&view=ok> pada 29 Mei 2021.
- CNNIndonesia.com. (2020). *Jokowi Ingin Kemudahan Berusaha Naik ke Peringkat 40*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200212110706-92-473856/jokowi-ingin-kemudahan-berusaha-naik-ke-peringkat-40> pada 22 Februari 2021.
- Financial Service Commision South Korea, *Introduction*, diakses melalui <https://www.fsc.go.kr/eng/ab010101> pada tanggal 24 Mei 2021.
- Hukumonline.com. (2009). *Affirmative Action*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/> pada 18 Februari 2021.
- HukumOnline.com. *OJK Nilai Pungutan Bagian dari Keuangan Negara*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53904f3847357/ojk-nilai-pungutan-bagian-dari-keuangan-negara/> pada tanggal 26 Mei 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. (2019). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*, diakses dari https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf pada 19 Februari 2021.
- Kontan.co.id. (2016). *OJK Gantungkan Anggaran dari Pungutan*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-gantungkan-anggaran-dari-pungutan> pada 19 Mei 2021.
- Kontan.co.id. (2017). *OJK: Sumber Pemasukan Bisa Fleksibel*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-sumber-pemasukan-bisa-fleksibel> pada 22 Mei 2021.

Merdeka.com. (2019). *Sejarah GBHN Yang Kini Ingin Dihidupkan Kembali*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-gbhn-yang-kini-ingin-dihidupkan-kembali.html> pada 19 Februari 2021.

NicoGotama, B. (2020). *Peran OJK di Dalam Pasar Modal*, Artikel Ekonomi, Kompasiana, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/nicogotama/5e82f492097f3624d42d0632/peran-ojk-di-dalam-pasar-modal?page=all> pada 12 Mei 2021.

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *OJK Canangkan Nilai-nilai Strategis dan Tandatangani Pakta Integritas Untuk Mewujudkan Misi dan Visi OJK Sebagai Lembaga Terpercaya*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/193.pdf> pada 8 April 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, *Frequently Asked Questions*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keluangan.asp> diakses pada 20 Februari 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2014 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68P/HUM/2015 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 1 Angka (3) dan Angka (4), Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan Berikut Dengan Butir I Huruf B Angka 2, Butir II Angka 11, Butir II Angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014.